

“Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Sertifikat Ganda dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penguasaan hak atas tanah, faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda, serta penyelesaian sengketa penguasaan hak atas tanah akibat terbitnya sertifikat ganda dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan sengketa akibat terbitnya sertifikat ganda yang disebabkan oleh lemahnya administrasi pertanahan, ketidaktepatan dalam pemeriksaan data tanah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya perbuatan melawan hukum oleh oknum tertentu. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS, majelis hakim menyatakan bahwa pengalihan hak dan pemecahan sertifikat yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum pertanahan tidak hanya didasarkan pada keberadaan sertifikat, tetapi juga pada keabsahan proses perolehan hak atas tanah secara yuridis dan administratif.

Kata kunci : Sengketa Pertanahan, Sertifikat Ganda, Hak Atas Tanah, UUPA, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal regulations regarding land ownership, factors causing the occurrence of duplicate certificates, and the resolution of land ownership disputes resulting from the issuance of duplicate certificates from the perspective of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a

conceptual approach, and a case approach. Legal materials are obtained through literature studies that include laws and regulations, court decisions, law books, and scientific journals relevant to the research problem. The results of the study indicate that regulations regarding land rights and land registration aim to provide legal certainty for land rights holders. However, in practice, disputes are still found due to the issuance of duplicate certificates caused by weak land administration, inaccuracy in land data inspection, low public awareness, and the existence of unlawful acts by certain individuals. Dispute resolution can be carried out through non-litigation or litigation channels. In Bekasi District Court Decision No. 128/PDT.G/1996/PN.BKS, the panel of judges declared that transfers of rights and divisions of certificates carried out without a valid legal basis are legally void. This decision demonstrates that legal certainty in land matters is based not only on the existence of certificates, but also on the legal and administrative validity of the land rights acquisition process.

Keywords: Land Disputes, Double Certificates, Land Rights, UUPA, Legal Certainty.